

PENDIDIKAN DAN KEADILAN SOSIAL

Mukhlis

Institut Kariman Wirayudha (INKADHA) Sumenep

Hafid

Institut Kariman Wirayudha (INKADHA) Sumenep

Abstract

Keadilan Sosial merupakan hal penting dalam melestarikan HAM (hak asasi manusia), secara secara positif hak asasi manusia bertujuan untuk memberikan kesamaan hak pada manusia sebagaimana memberikan hak-hak dasarnya tanpa membedakan suku, bangsa warna kulit, jenis kelamin dan agama. Pendidikan berkeadilan sosial harus mampu membuka perluasan dan pemerataan kesempatan kepada setiap warga Negara untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan harus bisa diarahkan pada tercapainya pendidikan untuk semua, dan pendidikan harus mampu membuka peluang akan hak-hak masyarakat termasuk hak pendidikan.

Keywords: Pendidikan, Keadilan, Sosial

Pendahuluan

Pendidikan secara umum merupakan usaha mencerdaskan peserta didik, Pendidikan Secara nasional, merupakan sarana yang dapat mempersatukan setiap warga negara menjadi suatu bangsa. melalui pendidikan, setiap peserta didik difasilitasi, dibimbing dan dibina untuk menjadi warganegara yang menyadari dan merealisasikan hak dan kewajibannya. Pendidikan juga merupakan alat yang menjadikan setiap peserta didik dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi.

Pendidikan memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan berdasarkan perundang-undangan yang meliputi tiga hal, *Pertama* Administrasi

Mukhlis

dan supervisi pendidikan, *Kedua*, Bimbingan dan penyuluhan, dan *Ketiga*, Proses belajar mengajar dan evaluasi hasil belajar :¹

Pendidikan memiliki makna yang sangat penting dalam kehidupan. makna penting ini telah menjadi kesepakatan yang luas dari setiap elemen masyarakat. Rasanya, tidak ada yang mengingkari, apalagi menolak, terhadap arti penting dan seknifikansi pendidikan pendidikan terhadap individu dan juga masyarakat. Lewat pendidikan, bisa diukur maju mundurnya sebuah Negara. Sebuah Negara akan tumbuh pesat dan maju dalam segenap bidang kehidupan jika ditopang oleh pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya konidisi pendidikan yang kacau dan amburadul akan berimplikasi pada kondidisi Negara yang juga karut marut.² Isi pendidikan terdiri atas problem-problem actual yang dihadapi dalam kehidupan nyata di masyarakat.³

Pendidikan sangat luas pembahasannya, karena berbicara tentang pendidikan bisa dilihat dari banyak hal. Baik dari kurikulum pendidikan, manajemen pendidikan ataupun dari perbandingan pendidikan, dan lain sebagainya. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas bahwa pendidikan merupakan alat yang ampuh untuk menjadikan setiap peserta didik dapat duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi, ini menunjukkan bahawa pendidikan sangat berhubungan erat dengan kehidupan masyarakat.

Dari latar belakang di atas tulisan ini hanyan difokuskan pada tiga hal *pertama*, apa tujuan dari pendidikan, *kedua*, Keadilan sosial, dan *Ketiga*, Pendidikan berkeadilan sosial

Tujuan Pendidikan

Tujuan pendidikan yaitu agar anak dapat mengenal, menciptakan dan melaksanakan nilai-nilai⁴ (self realization)⁵. Tujuan pendidikan secara umum

¹ Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan Indonesia Di Tinjau Dari Sudut Hukum*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994), hlm. 286.

² As'aril Muhajir, *Pendidikan Perspektif Kontekstual*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm. 17.

³ Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 5.

⁴ Nilai-nilai ekonomis, nilai-nilai sosial, nilai-nilai politik, nilai-nilai kesenian, nilai-nilai ilmu pengetahuan dan nilai-nilai agama.

⁵ I.L. Pasaribu, Simadjuntak, *pendidikan Nasional Tinjauan Pedagogik Teoritis*, (Bandung: TARSITO, 1982), hlm. 59.

dapat dilihat dari tujuan Pendidikan Nasional⁶ yang terdapat dalam undang-undang sisdiknas, diantaranya adalah:⁷

- a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu⁸ bagi seluruh rakyat Indonesia.
- b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
- c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
- d. Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
- e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI.

Pada kenyataan yang ada, tujuan pendidikan tersebut tidak bisa terealisasi dengan baik. Misalnya pada tujuan yang pertama, tentang pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.

Hal ini diperkuat pendapat Rina Ngesti Anggraini, bahwa Pemerataan pendidikan nasional tidak terealisasi dengan baik karena adanya beberapa faktor:⁹

- a. Perbedaan tingkat sosial ekonomi masyarakat
- b. Perbedaan fasilitas pendidikan
- c. Sebaran sekolah tidak merata
- d. Nilai masuk sebuah sekolah dengan standar tinggi
- e. Rayonisasi

⁶ Pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap perubahan tuntutan zaman.

⁷ <http://gusfumi.wordpress.com/> 19 November 2012.

⁸ ada sepuluh faktor penentu terwujudnya proses pendidikan yang bermutu, yakni: 1. Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah. 2. Partisipasi dan rasa tanggung jawab guru dan staf. 3. Proses belajar-mengajar yang efektif. 4. Pengembangan staf yang terprogram. 5. Kurikulum yang relevan. 6. Memiliki visi dan misi yang jelas. 7. Iklim sekolah yang kondusif. 8. Penilaian diri terhadap kekuatan dan kelemahan. 9. Komunikasi efektif baik internal maupun eksternal. 10. Keterlibatan orang tua dan masyarakat secara intrinsik.

⁹ Muhammad Rifa'i, *Politik Pendidikan Nasional*, (Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011), hlm. 131-132.

Tidak hanya pemerataan pendidikan yang tidak dapat terealisasikan dengan baik, namun rakyat Indonesia juga tidak mendapatkan Pendidikan bermutu secara keseluruhan. Karena selama ini, pendidikan berkualitas selalu identik dengan biaya mahal. Padahal, berkualitas tidak harus identik dengan tingginya biaya. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya, tetapi bukan berarti tidak mungkin kuncinya terletak ditangan pengelola. Para pengelola harus memiliki kreatifitas dan keberanian melakukan berbagai ragam terobosan yang memungkinkan tercapainya tujuan pendidikan murah namun berkualitas.¹⁰

Selain dari permasalahan dua hal tersebut, ada lagi contoh yang menunjukkan bahwa tujuan pendidikan tidak berjalan sesuai dengan rencananya. Contohnya persoalan yang dihadapi sekarang ini yang menunjukkan bahwa pendidikan Nasional sudah lama dirasakan tidak memberikan ruang bagi tumbuhnya pribadi-pribadi manusia yang memiliki nilai-nilai dasar seperti keteguhan dalam berprinsip, konsistensi, integritas, disiplin, bertanggung jawab, kerelawanan, solidaritas sosial dan toeran terhadap segala bentuk perbedaan.¹¹ Kenyataannya pendidikan nasional hanya menawarkan sesuatu yang sifatnya material dan positivistik. Segala sesuatunya diukur dengan berdasarkan pada yang kuantitatif, seperti angka partisipasi masyarakat yang tinggi, nilai ujian yang tinggi, serta jumlah lulusannya yang banyak.

Banyak masalah-maslah pendidikan nasional yang kita hadapi sebenarnya, setidaknya ada sembilan masalah. Diantaranya:¹²

1. Masalah banyaknya anak yang tidak dapat ditampung di sekolah
2. Masalah besarnya droup-out
3. Masalah ketidak seimbangan horisontal dan vertikal
4. Masalah tenaga guru
5. Masalah kurikulum dan metode mengajar yang usang
6. Masalah uang sumbangan pendidikan
7. Masalah ujian negara yang sentralistik
8. Masalah kemacetan mekanisme inspeksi dan supervisi
9. Masalah tidak memenuhinya syarat-syarat prasarana dan sarana pendidikan

Dengan adanya kenyataan itu, menunjukkan bahwa permasalahan yang cukup serius dalam dunia pendidikan kita. Untuk menyelesaikan permasalahan

¹⁰ Ngainun Naim, *Rekontruksi Pendidikan Nasional Membangun Paradigma Yang Mencerahkan*, (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 261.

¹¹ Darmaningtyas, *Pendidikan Rusak-Rusakan*, (yogyakarta: PT Lkis Pelangi Aksara, 2007), hlm. 313.

¹² ST. Vembriarto, *Kapita Slekta Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita, 1984), hlm. 27-35.

tersebut tidak mudah perlu adanya kerja keras dari pemerintah dan masyarakat secara umum. Selain dari itu, yang perlu kita ketahui juga ada beberapa faktor yang menyebabkan tidak terwujudnya pendidikan yang berkualitas, diantaranya:¹³

- a. Kurangnya pendidikan politik, Kekurangan kehidupan politik membawa pendidikan pada kondisi kehancuran. Para penyelenggara negara serta sejumlah pemimpin kekuatan sosial politik tidak dapat berbuat banyak untuk mencipkan kebijakan pendidikan sejalan dengan kehendak konstitusi dan siap siaga terhadap tantangan dunia maju.
- b. Kurangnya kemampuan birokrasi pendidikan, karakter birokrasi yang seharusnya menjadi kekuatan profesional yang cerdas di dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, semakin lama semakin menjadi sekedar birokrasi atas nama pendidikan, lebih cenderung membela kepentingan birokrasi sendiri, dengan sikap serta pendekatan yang, pragmatik, dan formalistik. Tidak sedikit para birokrat yang hanya mampu berlindung dibalik peraturan yang ditetapkan, tanpa mampu menilai relevansi peraturan dari sudut perkembangan dan kemajuan pendidikan.
- c. Kurangnya pemahaman pelaksana pendidikan, konsep dan sistem pengelolaan yang sudah menjadi tradisi di dalam dunia pendidikan, menundukkan mereka pada posisi pelaksana dalam arti yang mekanistik, konservatif, pasif dan tidak jarang atas tuntutan birokrasi submisif. Ketika guru terbiasa bertindak hanya setelah mereka memperoleh petunjuk pelaksanaan dari birokrasi yang juga sering kurang memahami inti permasalahan, seakan-akan inisiatif guru semakin tidak diperlukan, dan dengan demikian inisiatif itu dalam waktu yang singkat mati dengan sendirinya.

Keadilan sosial

Keadilan atau adil menurut Al-Mursyid adalah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih dan tanpa kurang antara sesama yang berhak, dan menghukum orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya. Secara lebih singkat adil dapat difahami dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya.

Dalam pandangan Masyhur keadilan sosial adalah merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, pengusaha-pengusaha, dan

¹³ Winarno Surakhmad, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, (Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009), hlm. 191-195.

orang-orang mewah yang didapatnya dengan tidak wajar.¹⁴ Keadilan Sosial merupakan hal penting dalam melestarikan HAM (hak asasi manusia), Hak Asasi Manusia secara positif bertujuan untuk mendudukkan manusia sebagaimana mestinya dengan memberikan hak-hak dasarnya¹⁵ tanpa membedakan suku, bangsa warna kulit, jenis kelamin dan agama.¹⁶

Keadilan Sosial harus benar-benar dilaksanakan karena disamping keadilan sosial merupakan salah satu landasan filosofis bangsa Indonesia “Pancasila”, juga merupakan orientasi dalam pendidikan nilai-nilai pancasila. Ada lima hal yang termasuk nilai-nilai tersebut diantaranya adalah:

1. Nilai pertama ialah bahwa pendidikan haruslah memperlakukan manusia dengan hormat, karena menurut keyakinan religius manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang tertinggi di antara ciptaan lainnya di dunia.
2. Nilai kedua ialah bahwa pendidikan harus bersifat manusia. Dasar dari setiap perlakuan yang manusiawi adalah perlakuan terhadap manusia sebagai pribadi (*persona*) atau sebagai subjek. Inilah maksud dari istilah “manusia seutuhnya”, artinya manusia sebagai subjek. Ia tidak boleh dijadikan objek atau alat guna mencapai tujuan tertentu, tetapi justru ia menjadi tujuan.
3. Nilai ketiga adalah nasionalisme (mencintai tanah air), Ini berarti menempatkan kepentingan bangsa dan negara diatas kepentingan diri atau kelompok yang sempit.
4. Nilai keempat adalah demokratis. Demokrasi (pemerintahan atas asas kerakyatan) Setiap warga negara memiliki hak untuk ikut serta menentukan kebijakan-kebijakan yang menentukan nasibnya. Pengembangan demokrasi haruslah dimulai sedini mungkin, khususnya dalam pendidikan. Kendala budaya untuk mengembangkan demokrasi yang menjadi masalah dalam setiap pembangunan politik adalah bagaimana menciptakan etos yang akan mendorong kemandirian individu dan membantu setiap warga negara untuk melihat dirinya sebagai partisipan (peserta) politik.
5. Nilai kelima adalah keadilan sosial. Pendidikan sebagai jalur pengembangan diri manusia haruslah menjadi pendidikan untuk keadilan, dan sekaligus menjadi perwujudan dari keadilan sosial. Manusia hanya dapat merealisasikan dirinya sebagai manusia kalau haknya yang fundamental (keadilan social)

¹⁴ Kahar Masyhur, *Membina Moral dan Akhlaq*, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, cetakan pertama, 1994), hlm. 68

¹⁵ Hak-haknya bisa meliputi: hak ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

¹⁶ Dosen Agama Islam, *Pendidikan Agama Islam Membangun Kepribadian Generasi Islam*, (Kalimantan Timur: MPK Universitas Mulawarman, 2010), hlm. 97.

tercapai. Keadilan sosial bukan hanya soal keutamaan yang dimiliki oleh individu, tetapi keadilan sosial adalah soal penciptaan tatanan yang mencakup bidang sosial, politik dan ekonomi.¹⁷

Pendidikan berkeadilan sosial

Pendidikan merupakan hak setiap manusia di dunia. Di Indonesia, hak tersebut tercantum dalam UUD 1945 pasal 31 yang berbunyi pendidikan adalah hak bagi setiap warga negara.¹⁸ Dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas juga dijelaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Oleh karena itu pencerdasan terhadap warga negara merupakan kewajiban pemerintah, selain itu salah satu tugas pemerintah memberi fasilitas agar pendidikan berlangsung dengan baik.

Kenyataan yang ada masih banyak sekolah di daerah yang boleh dikatakan sebagai sekolah miskin. Betapa tidak, masih ada sekolah yang dindingnya terbuat dari papan kayu yang sudah jebol disana sini, eternitnya sudah banyak yang ambrol, lantai yang terbuat dari semen pun pecah-pecah dan berlubang, juga meja dan kursi pun tampak penuh dengan paku agar tak semakin reyot.¹⁹ Dengan melihat realita demikian menunjukkan bahwa pemerintah tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai dan baik terhadap sekolah.

Pemerintah yang ideal bagi pendidikan adalah yang tidak lagi memakai pendidikan sebagai alat politik untuk melestarikan kekuasaan, karena Pemerintah merupakan pemberi fasilitas pendidikan, bukan pengintervensi kebijakan sekolah. Untuk itu pendidikan harus benar-benar bisa mandiri dalam merumuskan kebijakan kegiatan belajar mengajar.²⁰

Dalam menggagas pendidikan berkeadilan sosial, kita dapat menjadikan demokratisasi pendidikan sebagai konsep. Yang mana dalam demokratisasi pendidikan itu terdapat tiga strategi yang meliputi:

1. Pendidikan harus mampu membuka perluasan dan pemerataan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Upaya perluasan

¹⁷ <http://kongrespendidikan.web.id/humanisme-sebagai-prinsip-pendidikan-menurut-driyarkara.html>.
13 Maret 2020.

¹⁸ Darmaningtyas, dkk. *Membongkar Ideologi Pendidikan Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004), hlm. 15.

¹⁹ Akhmad Muhaimin Azzed, *Pendidikan Yang Membebaskan*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.27

²⁰ Abdul Munir Mulkhan, *Nalar Spiritual Pendidikan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana 2002) hlm. 44

dan pemerataan pendidikan sebenarnya telah dilakukan pemerintah dengan adanya kesempatan pendidikan dasar sembilan tahun. Namun akibat krisis ekonomi dan konflik sosial, angka partisipasi pendidikan tersebut menjadi menurun. Oleh sebab itu, strategi yang perlu dilakukan adalah pemantapan pendidikan dasar sembilan tahun, pemberian beasiswa dengan sasaran strategis, pemberian insentif kepada guru yang bertugas di daerah terpencil, pemantapan sistem pendidikan terpadu untuk anak berkelainan, dan peningkatan keterlibatan peran serta masyarakat dalam membantu pendidikan.

2. Pendidikan harus diarahkan pada tercapainya pendidikan untuk semua. Ada kecenderungan bahwa program pendidikan hanya berorientasi untuk kelompok tertentu, terutama pada institusi yang diklaim masyarakat sebagai kelompok sekolah “favorit”. Pada sekolah ini tidak cukup ruang untuk kelompok lain dalam mengakses pendidikan. Apabila dibiarkan maka kondisi ini dapat berdampak pada perlakuan diskriminatif terhadap anak bangsa. Demikian pula, pemberlakuan sistem penerimaan mahasiswa baru yang dilakukan melalui penelusuran minat-bakat dan potensi (PMBP) berpotensi untuk menyemaikan benih diskriminatif kalau tidak dilakukan secara transparan dan berorientasi akademik. Padahal masih banyak peserta didik yang memiliki kemampuan akademis yang belum tersentuh oleh lembaga pendidikan unggul. Untuk memecahkan masalah ini perlu diakomodasi ide-ide “pendidikan Untuk Semua”, yang antara lain membuka kesempatan kepada semua siswa dimanapun dan kapanpun.
3. Pendidikan harus membuka peluang akan hak-hak masyarakat termasuk hak pendidikan. Selama ini ada anggapan bahwa sebagai masyarakat dan orang tua masih kurang peduli terhadap pendidikan anaknya. Sikap penurunan martabat anak, masyarakat bahkan pemerintah. Untuk itu, hal demikian tidak dapat dibiarkan secara terus menerus karena dapat berakibat kurang baik terhadap masa depan mendatang, pengakuan hak pendidikan bagi semua warga negara perlu disosialisasikan kepada publik.²¹

Kesimpulan

Pendidikan merupakan keharusan bagi setiap masyarakat agar mampu melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin untuk bisa menjadi pegangan hidup baik individu maupun kelompok. Tujuan Pendidikan secara umum yang

²¹ <http://pmiibandung.wordpress.com/2007/07/13/menggagas-pendidikan-berbasis-keadilan-sosial/> november 2012

terdapat dalam undang-undang sisdiknas, *Pertama*, Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. *Kedua*, Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar. *Ketiga*, Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. *Keempat*, Meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas lembaga pendidikan dan pengelolanya sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan global. *Kelima*, Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks NKRI. Pendidikan yang berkadailan sosial, harus mampu membuka perluasan dan pemerataan kesempatan kepada setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Pendidikan harus diarahkan pada tercapainya pendidikan untuk semua, dan Pendidikan harus membuka peluang akan hak-hak masyarakat termasuk hak pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Azzed, Akhmad Muhaimin, *Pendidikan Yang Membebaskan*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Darmaningtyas, dkk. *Membongkar Ideologi Pendidikan Jelajah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2004.
- Dosen Agama Islam, *Pendidikan Agama Islam Membangun Kepribadian Generasi Islam*, Kalimantan Timur: MPK Universitas Mulawarman, 2010.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan TERjemah*, Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005
- Erwin, Mahrus., Syamsul Kurniawan, *Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam*, Jogjakarta: Aaaaar-Ruzz Media, 2011.
- <http://gusfumi.wordpress.com/>
- <http://kongrespendidikan.web.id/humanisme-sebagai-prinsip-pendidikan-menurut-driyarkara.html>. 15 Oktober 2012.

Mukhlis

<http://pmiibandung.wordpress.com/2007/07/13/menggagas-pendidikan-berbasis-keadilan-sosial>. 17 Oktober 2012.

Surakhmad, Winarno, *Pendidikan Nasional Strategi dan Tragedi*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2009

Martini, mimi. Hadari Nawawi, Mimi Martini, *Kebijakan Pendidikan Indonesia Di Tinjau Dari Sudut Hukum*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1994.

Masyhur, Kahar, *Membina Moral dan Akhlaq*, Jakarta: PT Rieneka Cipta, cetakan pertama, 1994.

Muhajir, As'aril, *Pendidikan Perspektif Kontekstual*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.

Mulkhan, Abdul Munir, *Nalar Spiritual Pendidikan*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana 2002.

Muhaimin, *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Quthb, Sayyid, *Keadilan Sosial Dalam Islam*, Bandung: Pustaka, 1994.

Rifa'I, Muhammad, *Politik Pendidikan Nasional*, Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2011.

Simadjuntak, I.L. Pasaribu, *pendidikan Nasional Tinjauan Pedagogik Teoritis*, Bandung: Tarsito, 1982.

Undang-undang Republik Indonesia no 20 tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bandung: Fokus Media, 2006.